

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA TANJUNGPINANG

Oleh

Dwi Anggi Putri

Nim. 180565201045

aiztifasazkia@gmail.com

**Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji**

ABSTRAK

Adanya fenomena tentang penyimpangan berupa pelanggaran reklame tidak berizin, lokasi dan ukuran reklame yang tidak sesuai izin yang diperbolehkan. Sehingga dapat diidentifikasi permasalahan reklame yaitu: Banyaknya reklame-reklame yang dipasang disembarang tempat di Kota Tanjungpinang, adanya pelanggaran yang tidak mempunyai izin pemasangan reklame, pengawasan yang dilakukan dinas terkait belum maksimal, masih rendahnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak, masyarakat dan perusahaan yang tidak memiliki izin pemasangan reklame, masih banyaknya reklame yang masa izinnya sudah habis tetapi masih terpasang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Pengawasan Penyelenggaraan Reklame di Kota Tanjungpinang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 7 (Tujuh) orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan reklame di Kota Tanjungpinang sudah efektif meskipun masih ada yang belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pengukuran hasil kerja dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan pada proses perencanaan sudah terlaksana namun dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan reklame masih terdapat perselisihan beda pendapat antar Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian dalam pemeriksaan dan pemberian laporan seluruh pelaksanaan kerja, dalam melakukan surveynya tim satgas pengawasan penyelenggaraan reklame akan turun semua ke lapangan. Serta laporan-laporan yang diberikan akan langsung di data oleh OPD terkait. Selanjutnya pada pengambilan tindakan-tindakan korektif terhadap kemungkinan akan atau telah terjadi penyimpangan dengan tindakan korektif yang diberikan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi atau pendekatan. Kemudian memperingati terdahulu bagi pengusaha reklame yang melanggar, jika tidak ada tindakan maka reklame akan dibongkar atau dicabut.

Kata Kunci : Pengawasan, Reklame, Tim Satuan Tugas

**SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF BILLBOARDS IN
TANJUNGPINANG CITY**

By

Dwi Anggi Putri

Nim. 180565201045

aiztifasazkia@gmail.com

**Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji**

ABSTRACT

There is a phenomenon about deviations in the form of violations of unlicensed advertisements, the location and size of billboards that are not in accordance with the permits allowed. So that billboard problems can be identified, namely: The number of billboards installed in any place in Tanjungpinang City, violations that do not have a billboard installation permit, supervision carried out by related agencies has not been maximized, still low sanctions given to taxpayers, the public and companies that do not have billboard installation permits, there are still many billboards whose permit period has expired but are still installed. This study aims to find out how the Supervision of The Implementation of Billboards in Tanjungpinang City. The method used in this study is a qualitative descriptive method with 7 (seven) informants and uses data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation. The results showed that the supervision of the implementation of billboards in Tanjungpinang City was as effective even though there were still some that were not optimal. This can be seen from the measurement of work results using standards that have been set in the planning process that have been carried out, but in the supervision activities of the implementation of billboards there are still disputes of differences of opinion between Regional Apparatus Organizations. Then in the inspection and providing reports on all work implementation, in conducting the survey, the task force team for monitoring the implementation of billboards will all go to the field. As well as the reports provided will be directly data by the relevant OPD. Furthermore, in taking corrective actions against the possibility of or having occurred deviations with corrective actions given is to provide education to the community by conducting socialization or approaches. Then commemorate the previous one for the infringing billboard entrepreneur, if there is no action then the billboard will be dismantled or revoked.

Keywords : Supervision, Billboards, Task Force Team